



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EFENDHI PRIH RAHARJO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 663545

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.116.901.950

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/400 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/250 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.550.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 345 m2/300 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 610.000.000
5. Tanah Seluas 710 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 217.500.000
6. Tanah Seluas 1424 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 241.579.200
7. Tanah Seluas 1167 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 204.822.750
8. Tanah Seluas 1118 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 207.500.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/100 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 514.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ (4X2)/ MOBIL PENUMPNG Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARRIS S TRD CVT A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. MOTOR, HONDA ALL NEW PCX 160 ABS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	81.148.880
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	478.153.938
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	7.190.704.768
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.190.704.768

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.